

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai negara di Timur Tengah memiliki sistem politik yang beraneka ragam, seperti monarkhi dan republik. Monarkhi sendiri memiliki berbagai variasi, yaitu absolut dan konstitusional. Arab Saudi merupakan negara yang menggunakan sistem monarkhi absolut. Hukum yang digunakan adalah hukum Syariat Islam yang berdasar pada pengamalan ajaran Islam sesuai dengan pemahaman kaum Wahhabi terhadap Al Qur'an dan Hadits. Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Sa'ud atau dikenal dengan sebutan Ibnu Sa'ud memproklamirkan berdirinya Kerajaan Arab Saudi dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd, Ha-a, Asir, dan Hijaz pada 23 September 1932. Kemudian Abdul Aziz menjadi raja pertama dalam kerajaan tersebut. Nama Saudi berasal dari nama keluarga Raja Abdul Aziz as-Sa'ud.¹

Arab Saudi dibawah kekuasaan monarkhi absolut, juga merupakan negara yang menjalankan sistem totaliter. Seperti halnya Suriah, dimana sistem politik yang dijalankan pemerintahnya bersifat totaliter. Sistem ini menghendaki pengaturan masyarakat secara menyeluruh (total) atas dasar tertentu dengan kelompok kecil penguasa yang memonopoli kekuasaan.² Dalam hal tersebut, Suriah yang saat ini dipimpin oleh Bashar al-Assad selalu berada dibawah kekuasaan keluarga Assad yang telah berkuasa selama kurang lebih 40 tahun. Sedangkan Arab Saudi merupakan negara dengan bentuk monarkhi absolut dimana kekuasaan kepala negara atau pemerintahan berada ditangan raja praktis dan tidak terbatas yang masih dipegang kuat oleh dinasti Saud saat ini. Kedua negara tersebut juga bukan negara yang menerapkan sistem demokrasi. Arab Saudi bertindak membatasi berlakunya nilai-

¹ Sidik Jatmika, 2014, *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*, Yogyakarta, Maharsa, hal. 69-70.

² Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Grasindo, hal. 225.

nilai liberal dan demokratis serta partisipasi politik warga negaranya.³ Partai-partai politik juga dilarang dan tidak adanya parlemen karena yang ada hanya permusyawaratan untuk memberikan nasehat dan sebagai pendamping raja dan keluarganya. Tidak hanya itu, pemimpin Arab Saudi memberikan hukuman bagi pihak yang menginginkan demokrasi.⁴

Pada penghujung 2010 hingga 2011, pergolakan politik melanda Timur Tengah yang disebut sebagai “*Arab Spring*” atau disebut juga “*Jasmine Revolution*”. Revolusi ini bertujuan untuk menumbangkan rezim otoriter dan menggantikannya dengan sistem demokrasi.⁵ Dengan semakin meluasnya aksi rakyat di beberapa negara di kawasan Timur Tengah yang menuntut demokrasi dan pergantian pemerintah, Arab Saudi tidak tinggal diam. Arab Saudi aktif memainkan perannya dalam mengatasi kelompok-kelompok revolusioner tersebut. Suriah merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang tidak lepas dari peristiwa *Arab Spring*.⁶

Suriah merupakan sebuah negara yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara di Jazirah Arab lainnya. Sejak 6 Maret 2011 yang diawali dengan demonstrasi damai, gelombang demonstrasi pro-demokrasi menyebar keseluruh penjuru Suriah terutama di kota Deraa, Suriah.⁷ Dalam demonstrasi tersebut, rakyat Suriah hanya menuntut pemerintah

³ Sidik Jatmika, 2000, *AS Penghambat Demokrasi*, Yogyakarta, BIGRAF Publishing, hal. 69.

⁴ Mulham Almalaika, Arab Saudi - Antara Modern dan Dogmatis, 10 Juni 2015, diakses dalam Deutsche Welle, melalui <http://www.dw.com/id/arab-saudi-antara-modern-dan-dogmatis/a-17306272> pada 13 Agustus 2017.

⁵ Azhari Setiawan, *Diplomatic Dilemma dan Standar Ganda Politik Amerika Serikat Terhadap Konflik Sipil-Militer Mesir Tahun 2013*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol.4 Edisi 1/ April 2015, Pusat Studi Masyarakat ASEAN dari Universitas Riau, hal. 67-68.

⁶ Fadhly Ikhsan, *Kebijakan Politik Luar Negeri Arab Saudi Terhadap Krisis Syria (2011-2014)*, Jom FISIP, Vol. 2 No.2/ Oktober 2015, Universitas Riau, hal. 2.

⁷ Trias Kuncahyono, 2012, *Musim Semi di Suriah: Anak-anak Penyulut Revolusi*, Jakarta, Kompas, hal. 114.

agar melakukan perbaikan kesejahteraan dan hak-hak politik. Akan tetapi, konflik tersebut kemudian menjadi semakin keruh karena tuntutan rakyat untuk menurunkan Bashar al-Assad dari kekuasaannya.⁸ Dalam perkembangannya pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk menghadang aksi para demonstran yang menimbulkan korban berjatuhan. Tindakan pemerintah yang dinilai melanggar hak asasi manusia tersebut membuat rakyat semakin tidak puas dengan kinerja pemerintah. Warga sipil dan beberapa tentara yang membelot dari pemerintahan berbondong-bondong bersatu dan membentuk unit pertempuran di bawah bendera Tentara Kebebasan Suriah atau *Free Syrian Army* (FSA).⁹

Dalam konflik di Suriah, Arab Saudi bukan bertidak menentang kelompok revolusioner seperti yang telah dilakukannya di Tunisia, Mesir, Bahrain, dan Yaman. Akan tetapi Arab Saudi justru memberikan dukungan terhadap kelompok oposisi dalam upaya untuk menumbangkan penguasa di Suriah.

Pada saat terjadi pergolakan di Suriah antara pemerintah dengan kelompok oposisi yang menuntut demokrasi, Arab Saudi tidak menunjukkan sikap yang sama seperti yang telah dilakukannya di Tunisia, Mesir, Bahrain, dan Yaman. Selama ini Saudi selalu mendukung para diktator negara-negara Timur Tengah dalam menghadapi aksi protes yang dilakukan oleh rakyatnya. Akan tetapi Arab Saudi justru mendukung kelompok revolusioner dan menentang pemerintah Suriah, Bashar al-Assad. Pada saat krisis terjadi Arab Saudi merupakan negara pertama yang merespon dengan agresif peristiwa konflik internal Suriah tersebut. Hal tersebut bermula dengan pernyataan resmi Arab Saudi melalui Raja Abdullah yang menyatakan bahwa pemerintah Suriah sebagai mesin pembunuh dan meminta

⁸ Hiski Darmayana, *Konflik Suriah Dan Skenario Imperialis Barat*, 13 Juli 2013, diakses dalam Berdikari Online, melalui <http://www.berdikarionline.com/konflik-suriah-dan-intervensi-imperialis-barat/> pada 13 Agustus 2017.

⁹ JPNN, *Dua Ribu Tentara Syria Membelot ke Jordania*, 25 September 2012, diakses dalam <http://www.jpnn.com/news/dua-ribu-tentara-syria-membelot-ke-jordania> pada 13 Agustus 2017.

masyarakat Suriah untuk menentang atas apa yang telah terjadi terhadap korban demonstran, dan dilanjutkan dengan penarikan duta besar Arab Saudi di Suriah.¹⁰

Arab Saudi merupakan salah satu dari sekian negara yang masuk kedalam blok melawan pemerintah Bashar al-Assad. Bahkan Arab Saudi secara transparan memberikan dukungannya kepada pihak oposisi. Dukungan tersebut dilakukan dengan memberi bantuan berupa persenjataan. Arab Saudi mengirimkan bantuan senjata dan alat-alat berat serta memberikan pelatihan militer kepada kelompok oposisi. Bukan hanya bantuan persenjataan yang diterima oleh pejuang oposisi Suriah, Arab Saudi juga memberikan bantuan dana berupa gaji dalam mata uang dollar atau euro.¹¹ Selain itu, Arab Saudi menjadi pelopor dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pejuang dan pengungsi Suriah. Pemerintah Arab Saudi juga mengajak negara-negara muslim lainnya untuk mengadakan pertemuan di Mekah, dimana pertemuan tersebut ditujukan untuk memperkuat jaringan anti-Suriah. Peranan aktif Arab Saudi semakin aktif setelah konflik memanas dengan masuknya Hizbullah dan Garda Revolusi Iran di Suriah.¹²

Agama Islam menurut Karen Armstrong di dalam bukunya yang berjudul “History of Islam” dikatakan bahwa hukum Islam tidak membenarkan perang terhadap negara yang memberikan kebebasan bagi warga muslimnya untuk beribadah, Islam melarang pembakaran, pengrusakan bangunan, dan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak berdosa dalam sebuah kampanye militer. Dengan keadaan yang sekarang bahwa apa yang dilarang oleh Islam justru dilakukan oleh orang-orang yang

¹⁰ Fadhly Ikhsan, *Op.Cit.*

¹¹ El Moussaoui, *Kepentingan Arab Saudi Dalam Perang Suriah*, 24 januari 2014, diakses dalam Deutsche Welle, melalui <http://www.dw.com/id/kepentingan-arab-saudi-dalam-perang-suriah/a-17385172> pada 13 Agustus 2017.

¹² Denny Armandhanu, *Saudi Kirim Rudal Anti-jet untuk Pejuang Suriah*, 18 Juni 2013, diakses dalam Viva News, melalui <http://www.viva.co.id/berita/dunia/421695-saudi-kirim-rudal-anti-jet-untuk-pejuang-suriah> pada 13 Agustus 2017.

mengatasnamakan dirinya sebagai muslim, dan dengan adanya perbedaan antara Islam Sunni dan Syiah membuat ada hal yang berbeda di dalam persaingan ideologi yang ada saat ini.¹³

Karen Armstrong juga mengatakan bahwa agama dapat disalahgunakan untuk meraih maksud dan tujuan tertentu, Armstrong mengidentifikasi bahwa agama pada masa-masa sekarang ini tampak telah kehilangan relevansinya. Hal itu terjadi dikarenakan oleh karakter manusia saat ini yang memiliki kecenderungan tidak lagi menyadari bahwa kehidupan kenyataannya memiliki kultur ilmiah yang mendidik manusia untuk memusatkan perhatiannya pada segala sesuatu yang berbau fisik dan materi belaka.

Persaingan ideologi antara islam sunni dengan syiah membuat adanya perbedaan pemahaman dalam masalah aqidah, kaum syiah memiliki pemikiran bahwa tidak di akuinya keberadaan sahabat rasul kecuali Ali bin Abu Tholib dan kaum syiah mengatakan bahwa Ali bin Abu Tholib lebih utama dari pada seluruh sahabat serta lebih berhak memegang kepemimpinan kaum muslim.

Sedangkan kaum islam sunni memiliki pemikiran mengakui bahwa 4 sahabat yaitu Abubakar ash Shiddiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abu Tholib. Kaum sunni sangat menggariskan pokok-pokok keimanan yang tidak boleh di selisih oleh kaum muslim yakni iman kepada Allah s.w.t , malaikat nya, kitab-kitab nya , rasulnya, hari kiamat, serta qadla dan qadar semua tertata sesuai ajaran islam di dalam Al-Qur'an tanpa ada yang di tambah atau dikurangi sedikitpun.¹⁴

Dari latar belakang di atas, dapat dijelaskan bahwa Arab Saudi telah menunjukkan indikasi terlibat dalam mendukung pihak oposisi di Suriah melalui pernyataan yang telah disampaikan oleh Raja Abdullah. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini berupaya untuk menjelaskan faktor-faktor yang

¹³ Armstrong, Karen, Islam: A Short History, A Modern Library Chronicles Book (New York, 2002)

¹⁴ Mulyana Asif Mu'iiin.SYIAH_DI_IRAN.Dalam <https://www.academia.edu.4524896>

menyebabkan Arab Saudi mendukung pihak oposisi dalam konflik Suriah tahun 2010-2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengajukan sebuah pertanyaan penelitian berikut: “Mengapa Arab Saudi mendukung oposisi suriah untuk menggulingkan pemerintahan Bashar-Al Assad?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami suatu permasalahan sekaligus menjawab penelitian di atas, memerlukan adanya kerangka berpikir. Kerangka pemikiran itu terdiri dari teori dan konsep. Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi dan berteori adalah mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi, dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.¹⁵ Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek atau Fenomena.¹⁶ Kedua hal tersebut yang menjadi acuan dan panduan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini dapat memenuhi prosedur ilmiah. Pada penelitian ini akan menggunakan teori Analisa Teori politik Luar Negeri dan Konsep Kepentingan Nasional.

1. Teori Politik Luar Negeri

Politik Luar Negeri adalah suatu kebijakan Negara, yang bertujuan untuk mencapai tujuan kepentingan nasional dalam batas wilayahnya dan di tetapkan dalam sejumlah keputusan kebijakan politik luar negeri suatu bangsa.

Politik Luar Negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah :

“foreign policy is a strategy or planned course or action developed by the decision makers of a state vis a vis other states or international entities, aimed at achieving specific goals defined in term of national interest.”

¹⁵ Mohtar Mas'ood, 1994, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, hal. 218.

¹⁶ *Ibid*, hal. 109.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton Politik Luar Negeri adalah kebijakan suatu negara dalam membuat strategi atau rencana yang dikembangkan oleh pengambil keputusan negara terhadap negara lain atau badan internasional, yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang spesifik dan didefinisikan dalam kepentingan nasional.¹⁷

Politik Luar Negeri bertujuan untuk mencapai keinginan nasional dan memenuhi kebutuhan suatu negara. Politik Luar Negeri merupakan langkah untuk mencapai sebuah tujuan negara dan mempertahankan sekaligus melindungi kepentingan nasional negara tersebut.

Arab Saudi sebagai negara yang memiliki pengaruh yang besar di jazirah Arab perlu untuk terus mempertahankan pengaruhnya di kawasan jazirah Arab. Sebagaimana yang terjadi yaitu adanya persaingan antara Arab Saudi dan Iran yang berujung pada terputusnya hubungan kedua negara. Arab Saudi yang selama ini sebagai negara yang dominan di jazirah Arab perlu untuk mempertahankan kawasan Arab dari pengaruh Iran yang semakin lama semakin mengancam.

2. Kepentingan Nasional

Para ahli memiliki definisi yang berbeda dalam mendefinisikan National Interest / Kepentingan Nasional. Hans Morgethau dalam *Politics Among Nations* menyebut kepentingan nasional sebagai suatu Power yang dapat diartikan sebagai pengaruh/kekuasaan/kekuatan. Berbeda dengan Morgenthau, Paul Seabury mendefenisikan kepentingan nasional secara deskriptif dan normatif ; secara deskriptif kepentingan nasional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedang secara normatif kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya dengan berhubungan dengan Negara lain.

¹⁷ <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t16855.pdf>, di akses tanggal 29 November 2017

Konsep Kepentingan nasional (*national interest*) oleh Jack C. Plano dan Roy Olton adalah tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum dan merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara untuk mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.¹⁸

Dalam konsep kepentingan nasional ini, ada lima kategori umum yang dijadikan sasaran yang hendak dituju yaitu : (1) *self preservation*, yaitu hak untuk mempertahankan diri, dimana setiap negara berhak untuk menjaga dirinya dari berbagai kemungkinan ancaman yang akan mengganggu kestabilan negara; (2) *independence*, yang berarti tidak dijajah atau tunduk pada negara lain, setiap negara berhak untuk merdeka dan sudah merupakan hak nya sebagai negara dan juga dimana negara tidak untuk patuh terhadap negara lain; (3) *territorial integrity*, negara berhak untuk menjaga keutuhan wilayah atau teritorial negaranya; (4) *military security*, berarti tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain, dengan kata lain tidak ada ancaman secara militer yang datang dari negara lain; (5) *economic wellbeing*, atau dapat disebut kesejahteraan ekonomi, sektor ekonomi harus selalu dijamin kesetabilannya oleh pemerintah agar tercipta kesejahteraan di negara tersebut.¹⁹

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik, ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Suatu negara dituntut untuk mensejahterakan seluruh warga negaranya serta menyediakan seluruh kebutuhan yang mendukung terciptanya kesejahteraan. Oleh karena itu, salah satu aspek dalam konsep kepentingan nasional untuk mewujudkan suatu kesejahteraan yaitu aspek keamanan.

¹⁸ Plano Jack C. Dan Olton Roy, 1999, *Kamus Hubungan Internasional*, Edisi Ke-3, diterjemahkan oleh Drs. Wawan Juanda, CV Putra A Bardin, hal 7.

¹⁹ *Ibid*, hal 128.

Kepentingan nasional Arab Saudi di kawasan jazirah Arab yaitu mempertahankan dominasi dan kekuatan untuk menjaga keamanan kawasan serta mempertahankan kekuatan islam sunni di timur tengah khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya. Persaingan antara kedua negara membuat Arab Saudi semakin gencar bertindak guna mewujudkan kepentingan nasionalnya.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut; Arab Saudi sebagai negara islam sunni mendukung oposisi Suriah untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Al-Assad, karena adanya perbedaan ideologi pemerintah Suriah yang dipimpin Bashar Al-Assad yang berideologi Syiah. Kedua pihak merasa terancam, sehingga timbulah konflik sebagai upay dan perlawanan *self preservation* untuk menjaga keutuhan negara.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi relevansi pemakaian Teori politik luar negeri dan kepentingan nasional dalam menjelaskan kasus yang penulis angkat. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen berupa intervensi Arab Saudi terhadap konflik Suriah pada tahun 2010 hingga 2015, sedangkan variabel independennya meliputi faktor kepentingan Arab Saudi di Suriah.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *causal explanation*, yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan penyebab dari fenomena yang diamati.²⁰ Penulis mencoba menjelaskan tentang penyebab intervensi Arab Saudi terhadap konflik Suriah pada tahun 2010 hingga 2015.

²⁰ Ulber Silalahi, 2007, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Refika Aditama, hal. 26.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan, yaitu data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, artikel, jurnal, dokumen, dan bahan dari internet. Data tentang kebijakan politik luar negeri pada penelitian ini didapatkan atau dikutip dari beberapa buku, jurnal, dan internet.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan telaah pustaka (*library research*), yaitu teknik dengan mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang di bahas. Selain itu juga mengunjungi beberapa situs di internet untuk melengkapi data yang penulis kumpulkan.²²

4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam memverifikasi hipotesa yang telah ditetapkan oleh penulis. Penulis akan menggunakan analisis data berupa analisis isi (*content analysis*) dalam penelitian ini, yaitu analisis data yang dilakukan melalui kajian-kajian terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.²³

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut;

1. Mengetahui bentuk intervensi Arab Saudi terhadap konflik Suriah pada tahun 2010 hingga 2015.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi intervensi Arab Saudi terhadap konflik Suriah pada tahun 2010 hingga 2015.

²¹ Gumilar Rusliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, Jurnal MAKARA Seri SOSIAL HUMANIORA, Vol. 9, No. 2, 2005, FISIPOL Universitas Indonesia, hal. 58-60.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah jangkauan penelitian sangat diperlukan guna membatasi permasalahan yang akan diteliti, sekaligus untuk mempermudah penulisan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan permasalahan yang sudah dipaparkan dalam hipotesis dan latar belakang masalah. Mengingat topik penulisan kali ini sangat luas ruang lingkupnya, maka rentang waktu, geografis, dan lingkup permasalahan dibatasi pada intervensi Arab Saudi terhadap konflik Suriah pada tahun 2010 hingga 2015.

H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini direncanakan dan disajikan dalam pembahasan menurut pembagian bab-bab sebagai berikut:

- BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku penulisan ilmiah yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, dan, sistematika penulisan.
- BAB II, merupakan bab yang akan menjelaskan pengaruh Arab Saudi di Jazirah Arab.
- BAB III, merupakan bab yang akan berupaya menjelaskan sejarah dan hubungan diplomatik Arab Saudi dan Suriah pada kepemimpinan Bassar Al Assad.
- BAB IV, merupakan bab yang membuktikan hipotesa yaitu menjelaskan alasan Arab Saudi mendukung pasukan oposisi Suriah.
- BAB V, merupakan bab kesimpulan dan penutup.